

**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI
PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN PADA DINAS
SOSIAL KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Serjana Strata 1**

Program Studi Administrasi Negara



Oleh :

**ABEL JECHLYDOR NABUN
2018020006**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PROGRAM
PELATIHANKETERAMPILAN PADA DINAS SOSIAL KOTA
SURABAYA**

Oleh:

ABEL JECHLYDOR NABUN

NIM 2018020006

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

Widyawati, S.Sos, M.Si

NIDN 070811710

PENGESAHAN SKRIPSI

**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PROGRAM
PELATIHAN KETERAMPILAN PADA DINAS SOSIAL KOTA
SURABAYA**

Disusun Oleh :

ABEL JECHLYDOR NABUN
NIM 2018020006

**Telah Dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima.**

Susunan Dewan Penguji,

Penguji I	: Widyawati S.Sos, M. Si
Penguji II	: Drs Basuki Nugroho, M.Si
Penguji III	: Dr. Hendro Wardhono M.Si

Surabaya,
Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd
NIDN : 0712115201

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat didalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Febuari 2022
Mahasiswa

Abel Jechlydor Nabun
2018020006

Program Studi Ilmu Administrasi
NegaraFakultas Ilmu
AdministrasiUniversitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Oleh karena itu skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- 2) Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- 3) Sri Roekminiati S.Sos, M.Kp selaku ketuaa program Studi Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- 4) Widyawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan koreksi dan arahan yang sangat membantu penlis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 5) Sri Kamariyah, M.Si selaku dosen wali dan semua pihak Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang sudah memberikan pelajaran dan dedikasi yang sangat berharga bagi penulis selama masa kuliah.
- 6) Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian

- 7) Teman-teman FIA angkatan 2018 yang sudah saling memberikan semangat dan kesan selama kuliah
- 8) Serta semua pihak yang sudah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9) kepada orangtua, dan teman yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis untuk proses penyusunan skripsi ini
- 10) kepada teman teman kelas A yang terus mendukung selama penulisan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Evaluasi pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya" skripsi ini dibuat untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Surabaya. Tujuan penelitian Untuk mengetahui pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan Untuk mengetahui bagaimana kendala program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya, Sehubungan dengan tujuan tersebut maka penulis akan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan publik menurut William Dunn (2003). Metode yang akan penulis gunakan yaitu kualitatif dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan keada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Terakhir Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, guna dapat memperbaiki skripsi ini. Trimakasih

Surabaya, 31 Januari 2022

Penulis

ABEL JECHLYDOR NABUN
NIM : 2018020006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2. Evaluasi	10
2.2.1 Pengertian Evaluasi	10
2.3. Kebijakan Publik	11
2.3.1. Jenis Kebijakan Publik	12
2.3.2. Proses Kebijakan Publik.....	14
2.4.Evaluasi Kebijakan Publik.....	18
2.4.1. Fungsi Evaluasi	19
2.4.2. Ciri-ciri Evaluasi	21
2.4.3 Jenis evaluasi	22
2.4.4 Model Evaluasi	23
2.4.5. Pengertian Pemberdayaan	25
2.5. Pemberdayaan.....	25

2.6. Anak Jalanan.....	27
2.6.1. Pengertian Anak Jalanan	27
2.6.2. Karakteristik Anak Jalanan	28
2.6.3. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan	28
2.7. Pelatihan	30
2.7.1. Pengertian Pelatihan	30
2.7.2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelatihan	31
2.7.3. Metode Pelatihan.....	31
2.7.4. Tujuan pelatihan	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Subyek Penelitian	35
3.4. Fokus Penelitian	35
3.5. Sumber Data	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknis Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.1.1. Gambaran Umum	39
4.1.2. Lokasi Dinas Sosial Kota Surabaya	40
4.1.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surabaya	40
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya..	41
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya	42
4.1.6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial.....	63
4.1.7. Profil UPTD Kampung Anak Negeri	65
4.2. Hasil Temuan Penelitian	71
4.2.1. Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan	71
4.2.2. Kendala Program Latihan Keterampilan Dinas Sosial Kota Surabaya	79

4.2.3 Peran pemerintah dalam pemberdayaan anak jalanan	80
4.3. Pembahasan	84
4.3.1 Efektivitas.....	84
4.3.2 Efisien	85
4.3.3 Perataan	86
4.3.4 Kecukupan.....	86
4.3.5 Keadilan	87
4.3.6 Responsivitas	88
4.3.7 Kendala program latihan keterampilan	89
4.3.8 Peran Pemerintah Lokal	89
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Fasilitas UPTD Kampung Anak Negeri.....	76
Tabel 4.2 Data pegawai UPTD Kampung Anak Negeri	81
Tabel 4.3 Data anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Evaluasi Kebijakan Publik.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kota Surabaya.....	40
Gambar 4.2 Struktur organisasi UPTD Kampung Anak Negeri.....	67

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan pemberdayaan yang diberikan berupa latihan keterampilan melukis, seni musik, beladiri, tenis meja Program pelatihan keterampilan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bakat dan keterampilan dasar anak-anak jalanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi bagaimana pemberdayaan anak jalanan yang melalui program latihan keterampilan dan faktor kendala di Dinas Sosial Kota Surabaya, yang mengingat meningkatnya jumlah anak jalanan di kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada yang dibahas oleh peneliti adalah Pemberdayaan anak Jalanan melalui program pelatihan di Dinas Sosial Kota Surabaya, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berpedoman pada enam elemen dasar Evaluasi Kebijakan Publik yaitu focus 1) efektifitas 2) efisiensi 3) pemerataan 4) kecukupan 5) keadilan 6) responsivitas dan kendala program pelatihan. Hasil temuan penelitian ini pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial kota Surabaya yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri sudah berjalan dengan baik, yang telah memberikan dampak positif dan manfaat yang baik bagi anak jalanan, anak terlantar dan anak yang memiliki masalah sosial, dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak jalanan, anak terlantar dan anak peyandang masalah sosial, dapat hidup secara layak dan kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa menggatungkan kehidupan di jalanan lagi, Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka, sehingga sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya proses pemberdayaan dalam diri mereka

Kata Kunci : Evaluasi, Program Latihan Keterampilan, Dinas Sosial Kota Surabaya

ABSTRACT

The Surabaya City Government through the Social Service has an active role in empowering and fostering street children. Empowerment is provided in the form of training in painting skills, music art, martial arts, table tennis. Skills training program which can improve skills and knowledge according to the talents and basic skills of street children. This study has the aim of evaluating how to empower street children through skills training programs and constraining factors at the Surabaya City Social Service, considering the increasing number of street children in the city of Surabaya. This study focuses on what is discussed by the researchers, namely the empowerment of street children through training programs at the Surabaya City Social Service, using descriptive qualitative research methods that are guided by the four basic elements of Public Policy Evaluation, namely focus on 1) effectiveness 2) efficiency 3) equity 4) adequacy 5) fairness 6) responsiveness and program constraints. training. The findings of this study were that the empowerment of street children through the skills training program at the Surabaya City Social Service which was carried out at the UPTD Kampung Anak Negeri had been going well, which had a positive impact and good benefits for street children, neglected children and children who have social problems, with the support of complete facilities and adequate human resources to meet the economic needs of street children, neglected children and children with social problems, can live properly and economic needs are met without depending on life on the streets anymore. The constraint factor in this training program is the lack of awareness children to practice and develop what is within them, so that it becomes an obstacle to the empowerment process within them.

Keywords: Evaluation, Skills Training Program, Surabaya City Social Service

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5 sampai 12 tahun, yang melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) demi memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Semakin berkembangnya negara Indonesia, permasalahan anak jalanan di berbagai kota khususnya di Surabaya tidak pernah ada habisnya. Alasan adanya anak jalanan penyebab lainnya adalah biaya hidup semakin mahal, maka terjadi ketimpangan social dimana-mana. Hal ini menyebabkan keluarga miskin menjadi

semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat pendidikan yang rendah bahkan tidak pernah merasakan pendidikan pada lembaga pendidikan formal membuat akses hidupnya menjadi terbatas dan kemudian terbelenggu dalam kemiskinan.

Lembaga pemerintah di wilayah kota Surabaya harus lebih memberikan perhatian dan sumberdaya agar melindungi anak jalanan baik dari segi fisik maupun psikis. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada dasarnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak. Di Indonesia, untuk mewujudkan hak anak telah dikeluarkan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Berdasarkan undang-undang di atas maka pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pembinaan, untuk memberikan keterampilan kepada anak jalanan supaya mereka tidak berkeliaran di jalan lagi dan setelah pembinaan keterampilan itu selesai mereka bisa membuka usaha sendiri dan tentunya dengan modal usaha dari pemerintah khususnya dari Dinas Sosial.

Secara umum pembinaan itu sendiri disebut sebagai perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan untuk mengasah bakat yang telah dimiliki anak jalanan. Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dengan secara sadar, berencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan tindakan bimbingan, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Depdiknas, 2002). Thoha (2002:7) mengemukakan pengertian pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, perkembangan atau atas peningkatan sesuatu.

Dalam mengatasi masalah anak-anak tersebut, merupakan tugas Pemerintah sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah itu sendiri tentang pembinaan dan kesejahteraan anak jalanan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial ini tidak sekejap, dimana anak jalanan hanya dianggap sebagai obyek yang mudah dibersihkan dari jalanan, tetapi perlu ditangani secara tuntas lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan dan tidak hanya terfokus kepada anak jalannya saja tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam membina anak jalanan. Dengan dikelurkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Dimana Pembinaan

tersebut dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Pondok Sosial ini sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial khusus anak naka, anak jalanan dan anak terlantar di wilayah Kota Surabaya. Tugas yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) tidak cukup merazia dan menekan jumlah anak jalanan, namun juga harus ada langkah selanjutnya yang berguna bagi anak jalanan agar mereka tidak lagi turun ke jalanan untuk mencari uang untuk menuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Surabaya harus lebih fokus terhadap program pemberdayaan anak jalanan.

Pelayanan terhadap anak jalanan yang diberikan di UPTD Kampung Anak Negeri dimaksud dapat menimbulkan keuntungan, kemanfaatan, keterampilan dan bakat sehinga mereka dapat melakukan fungsi sosial di masyarakat. Selain itu melalui pembinaan tersebut memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan bakat mereka masing masing-masing. agar mereka bisa kembali ke keluarga dan masyarakat agar tidak turun ke jalanan lagi. Oleh karena itu. kegiatan yang menjadi Program di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya dalam menangani anak jalanan, yaitu : keterampilan melukis, seni musik, beladiri , tenis meja Program pelatihan keterampilan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bakat dan keterampilan dasar anak-anak jalanan, tujuan program pelatihan keterampilan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak-anak jalanan, selain itu kebutuhan akan pelatihan keterampilan agar anak-anak jalan dapat mengasah dan mengembangkan bakat mereka masing-masing

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PEMBERDAYAAN ANAK JALAN MELALUI PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- 2) Bagaimana kendala program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- 2) Untuk mengetahui bagaimana kendala program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini di antranya sebagai berikut:

- **Manfaat Praktis**

Melalu penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti contoh dan sumbangan positif terhadap kajian dalam bidang

Ilmu Administrasi, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mengetahui Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Manfaat Teoritis

1). Untuk Mahasiswa

Melalui penelitian ini agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti dan mahasiswa dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, sebagaimana yang ditetapkan untuk mengetahui tentang Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

2). Untuk Masyarakat:

Dapat mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya kepada anak jalanan melalui penelitian Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

3). Untuk Dinas atau Instansi :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam hal Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapula beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yang mengenai evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Nurul Tantiana	Evaluasi kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang (2014)	Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang 2014	Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan bahwa kebijakan pemerintah kota tanjung pinang dalam menangani anak jalanan pada dinas sosial kota dan dan tenaga kerja kota tamjung pinang tahun 2014 belum berjalan dengan baik karna masi banyak hal yang harus di perhatikan. Walaupun sudah memiliki pekerja sosial yang memilik keahlian dalam bidang pelayanan kejejahteraan dan perlindungan anak.peningkatan kapasitas pendamping dan dan kelembagaan.Melalui seleksi,sertifikasi dan bimbingan pemantapan

					atau pelatihan bagi pekerja sosial, tenaga kerja sosial ,relawan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana,tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan makan efektifitas kebijakan akan sulit dicapai
2	Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa,Hery Wibowo	Evaluasi Peroses Pelaksanaan Program Pendidikan Terhadap Anak jalanan Binaan Di Rumah Singga (2016)	fokus penelitian dalam penelitian ini di fokuskan pada program pendidikan yang di berikan oleh dilts fundation pada anak jalanan binaan	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif	Hasil dalam penelitian ini,pemberian pendidikan pada anak jalanan adalah sangat penting yang dimana pendidikan harus mampu memberikan sumbangan pengetahuan setra wawasan pada anak jalanan sehingga mereka mempunyai bekal ke depan untuk menjadi landasan hidup meereka
3	Dyah Ayu W.L	Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Melalui Rumah Belajar Bagi Anak Jalanan Di Yayasan Keluarga Anak Langit Kota Tanggerang (2016)	Fokus dalam penelitian ini berfokus pada pendidikan keaksaraan, pengembangan nilai dan wawasan ,serta pemberian keterampilan guna meningkatkan potensi dan keahlian anak jalanan	Metodel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini, bahwa pendidikan non formal yang dilaksanakan yayasan keluarga anak langit telah memberikan dampak positif dan manfaat yang baik bagi kehidupan anak jalanan dan anak yang kurang mampu

Sumber : Diola Peneliti 2021

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nurul Tantiana yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, kebijakan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menangani anak jalanan pada Dinas Sosial Kota dan tenaga kerja Kota Tanjung pinang pada Tahun 2014, belum berjalan dengan baik karena masih banyak hal yang harus perlu diperhatikan. Walaupun sudah memiliki pekerja sosial yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak. Peningkatan kapasitas pendamping dan kelembagaan melalui seleksi, sertifikasi dan bimbingan pematapan atau pelatihan bagi pekerja sosial, tenaga kerja sosial, relawan sosial dan Lembaga kesejahteraan sosial. meskipun kebijakan sudah di komunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana tetapi jika tidak di dukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk melaksanakan kebijakan maka efektifitas kebijakan akan sulit di capai.

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Revanlee anandar, Budhi wibhawa, Hery wibowo yang berjudul evaluasi proses pelaksanaan program pendidikan terhadap anak jalanan binaan di rumah singgah, hasil dalam penelitian ini, memberikan pendidikan pada anak jalanan adalah sangat penting dimana pendidikan harus mampu menyumbangkan sumber pengetahuan serta wawasan pada anak jalanan sehingga mereka mempunyai bekal kedepan untuk menjadi landasan hidup mereka.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dyah W.L, yang berjudul Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Melalui Rumah Belajar Bagi Anak Jalanan Di Yayasan Keluarga Anaak Langit Kota Tangerang, hasil penelitian ini bahwa pendidikan non formal yang dilakukan yayasan keluarga anak langit telah memberi dampak positif dan manfaat yang baik bagi kehidupan anak jalanan dan anak yang kurang mampu

2.2. Evaluasi

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Menurut King dalam wirawan (1012 :64) Evaluasi merupakan suatu proses penilaian sistematis untuk menyediakan informasi dapat dipercaya mengenai karakteristik, aktifitas, dan keluaran program atau kebijakan untuk tujuan penelitian. ini meyakini pentingnya penggunaan dengan menyignifikasikan bahwa evaluasi harus di pakai untuk suatu tujuan penilaian. Evaluasi sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu. Proses evaluasi suatu pelaksanaan kegiatan dapat menampilkan informasi tentang sejauh mana tentang kegiatan itu sudah di laksanakan atau hal yang telah di capai. Standar dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dapat dijadikan arahan untuk menilai ketercapaian suatu program, kesesuaian dengan tujuan, keefektifan, efisien, dan hambatan yang ditemukan dalam suatu program

Menurut Daryanto (2008: 10), Evaluasi merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri seseorang dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi seseorang. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) dalam Prihatin (2011:

164), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses dari pengumpulan data dan analisis informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program.

Apabila pendekatan ini di aplikasikan dalam konteks Pendidikan berarti evaluasi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah strategi agar mengambil keputusan dinamis yang diberikan pada pembuat proses pengajaran atau pembelajaran proses itu akan terdiri dari 1) mengumpulkan data yang tepat, 2) membuat keputusan, 3) membuat keputusan sesuai data dengan tindakan relevan.

Berdasarkan pengertian evaluasi dari para ahli yang sudah dikemukakan terdapat beberapa pokok pikiran yaitu :

1. Pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta
2. Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan
3. Membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Pengambilan keputusan atau penilaian

2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan atau kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Friedrich dalam Thona, (2018 :107) meyakini bahwa kebijakan publik adalah satu tindakan publik yang mengarah kepada tujuan yang sudah diusulkan oleh seseorang, pemerintahan atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu yang

berhubungan dengan adanya hambatan tertentu atau mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut Mac Rae dan wilde dalam Islamy, (1998: 8) mengatakan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang memiliki pengaruh penting pada sejumlah orang. Pengetian ini memiliki maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait, yaitu pilihan pemerintah dan kebijakan itu mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

2.3.1. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (2004 :94) sebagai berikut :

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut yang akan dilakukan pemerintah sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilakukan.

2. Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan pada masyarakat, Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa larangan atau pembatas terhadap kelompok atau masyarakat sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan untuk mengatur alokasi kekayaan, pemilikan, pendapat atau hak diberbagai kelompok didalam masyarakat.

3. Kebijakan simbolis dan kebijakan material

Kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran sedangkan kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit kepada kelompok sasaran.

4. Kebijakan berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan bertujuan untuk mengukur pemberian barang untuk pelayanan publik sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyedia barang atau pelayanan pasar bebas

Menurut Nugroho (2004: 54-57) terdapat tiga jenis kebijakan publik sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada makna kebijakan publik

Berdasarkan maknanya, kebijakan publik adalah hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal yang ditetapkan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan.

2. Kebijakan publik dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif

Di Indonesia produk kebijakan publik yang di buat oleh kerjasama antara dua lembaga tersebut merupakan UU tingkat nasional dan peraturan daerah tingkat daerah untuk hal tertentu bersifat sementara sampai UU di buat. Bahkan di Indonesia yang mengesakan UU adalah presiden UU itu sendiri setelah ada persetujuan dari legislatif dan eksekutif .

3. Kebijakan publik yang di buat oleh eksekutif

Didalam didalam perkembangannya peran eksekutif tidak hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karna semakin meningkat masalah kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan publik pelaksanaan yang

berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang di tangani oleh eksekutif bertingkat sebagai berikut 1) peraturan pemerintah, 2) keputusan presiden, 3) keputusan menteri, 4) intruksi menteri

2.3.2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2005: 107) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan supaya mencapai hasil
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.4. Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya evaluasi merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang sudah dilaksanakan agar digunakan untuk meramalkan, menghitung, dan mengendalikan jalannya program kedepannya supaya jauh lebih baik. Oleh karena itu evaluasi lebih bersifat memandang kedepan ketimbang melihat kesalahan-

kesalahan dimasa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang sudah direncanakan sebelumnya yang dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang (Yusuf, 2000: 3).

Menurut Willam Dunn (2003 :610) Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan khususnya pada evaluasi program, yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas: Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalis teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- b. Efisiensi: Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalis ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya yang diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan: Berkenaan dengan jauh suatu tingkat efektif memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

- d. Perataan: Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.
- e. Responsivitas: Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu, kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan: Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban dan yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (dalam Arikunto, (2002:14) mengklasifikasikan metode pendekatan Patton dan Sawicki yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi enam yaitu:

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan program diimplementasikan.
- b. *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan

menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapatkan kebijakan atau program, yang telah diperbaharui dengan masukan perbandingan kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.

- c. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
- d. *Experimental (controlled models)*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e. *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan atau pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. *Costoriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap rencana.

Menurut Winarno (2008: 225) Bila kebijakan dilihat sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilaksanakan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering terjadi, kebijakan publik yang gagal meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan itu, evaluasi kebijakan ditujukan

untuk melihat penyebab kegagalan satu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai suatu kebijakan. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara profesional akan menghasilkan temuan yang obyektif adalah temuan apa adanya, baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi dan pada akhirnya agar memberikan manfaat pada perumusan kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap saja, melainkan untuk seluruh proses kebijakan. Dengan begitu, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan agar menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, ataupun tahap dampak kebijakan.

2.4.1. Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004: 463) mempunyai empat fungsi, merupakan eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui proses evaluasi dapat menggambarkan pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang akan diamati.

- a. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan atau ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut. Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik

Menurut Nugroho,(2004: 185). Evaluasi kebijakan dilaksanakan agar menilai hasil yang sudah dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang sudah dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi penilaian komprehensif terhadap:

- a. Pencapaian target (*output*)
- b. Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*)
- c. Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian
- d. Perbandingan nilai kinerja kebijakan dengan melakukan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sukses
- e. Identifikasi faktor pendukung kegagalan sehingga menimbulkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi agar menanggulangi kesenjangan. Fungsi dari evaluasi kebijakan publik.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008: 227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.4.2. Ciri-ciri Evaluasi

Sutjipta (2009) dalam evaluasi terdapat delapan ciri-ciri evaluasi yang meliputi:

1. Kualitas: Apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksanaan program.
2. Kesesuaian (*suitability*): Pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat
3. Keefektifan: Seberapa jauh tujuan tercapai.
4. Efisiensi: Penggunaan sumber daya dengan baik.
5. Kegunaan: Kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat.
6. Fokus nilai: Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
7. Interdependensi fakta nilai: Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta ataupun nilai
8. Orientasi masa kini dari masa lampau: Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

2.4.3. Jenis Evaluasi

Jenis evaluasi secara umum menurut Nugroho (2008: 537) mengelompokkan evaluasi dalam tiga jenis merupakan, yaitu :

- a. Evaluasi Tahap Perencanaan. Kata evaluasi sering kali digunakan dalam tahap perencanaan dalam mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini, evaluasi merupakan suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan perencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat bahwa program tersebut direncanakan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil kebijakan tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga

mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, baik membantu atau menghambat.

- c. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan. Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tapi hasil pelaksanaan yang dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.4.4. Model Evaluasi

William Dunn (dalam Keban, 2008: 143), mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari :

- a. The adversary model

Para evaluator dikelompokkan jadi dua, yang pertama bertugas menyiapkan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk mendapatkan hasil evaluasi program yang negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak sesuai sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

- b. The transaction model

Model ini untuk melihat penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistic, terdiri dua jenis, yaitu: evaluasi responsif yang dilaksanakan melalui kegiatan secara informal, berulang-ulang agar program yang sudah direncanakan agar dapat digambarkan dengan akurat; dan evaluasi iluminatif bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha menjelaskan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

c. Good free model.

Model evaluasi ini memiliki tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (*peneliti*) di posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas.

Hous, dalam Dunn, (2003: 194) menjelaskan, ada 3 macam evaluasi kebijakan publik, ialah:

a. Evaluasi administrative

Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. Dilaksanakan untuk mengevaluasi proyek pemerintah, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan sebagai

alat mengetahui apakah proyek pemerintah itu sudah sesuai dengan yang direncanakan (*the expected goals*)

b. Evaluasi yudisial

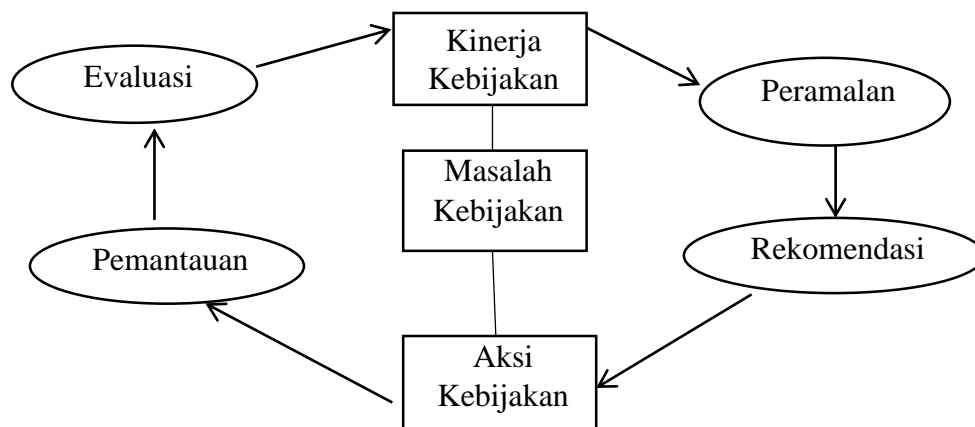
Evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan

c. Evaluasi politik

Pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, dan perpu

Berikut adalah gambar model evaluasi kebijakn publik:

Gambar 2.1
Model Evaluasi Kebijakn Publik



2.5.1. Pengertian Pemberdayaan

2.5. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pemberian kekuatan dan kemampuan pada seseorang atau kelompok orang yang tidak berdaya agar mereka bisa menjadi lebih berdaya. Menurut Suharto dalam buku pemberdayaan masyarakat desa berbasis

teknologi tepat guna didaerah (2021:18), mengatakana bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya terhadap kelompok rentan dan lemah sehingga mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan dalam 1. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka tidak memiliki kebebasan (*freedom*), yang artinya bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan 2. menjangkau sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan 3. berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa parah ahli di berikut ini mengemukakan defenisi pemberdayaan dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan

Menurut Mardikunto dan Soebianto (2013 :100) pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memperdayakan atau memperkuat kemampuan masyarakat dengan peroses belajar bersama-sama yang partisipatif, untuk mewujudkan terjadinya perubahan prilaku dan tingkah laku pada diri semua kelompok, individu dan kelembagaan yang terlibat didalam proses pembangunan, untuk terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, partisipatif, dan mandiri yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Suharto (2014:67) pelaksanaan peroses untuk mencapai tujuan yang di tetapkan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjasi 5P, merupakan sebagai berikut 1) pemungkinan, 2) penguatan, 3) perlindungan, 4) penyokongan, 5) pemeliharaan.

Pemberdayaan yang sesuai dengan pengetian pemberdayaan yang di ungkapkan oleh para ahli maka dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses

untuk membuat suatu organisasi atau masyarakat yang tidak berdaya untuk mendapatkan akses untuk mereka menjadi lebih berdaya.

2.6. Anak Jalanan

2.6.1. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan sekelompok anak-anak yang hidup dijalan yang tidak memiliki tali ikatan dengan keluarganya. Istilah Anak jalanan secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat walaupun memiliki hak kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya, tetapi realita berbeda. Istilah anak jalanan kemudian di defenisikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupi anak-anak jalanan, yaitu

Menurut A. Sudiarja (1997: 13) mengatakan bahwa sulit menghapus anggapan umum bagi anak jalanan, yang sudah terlanjur melekat pada masyarakat dimana mereka itu anak nakal, pengacau ketertiban, jorok dan mengotori kota. Menurut Indrasari Tjandraningsih (1995:13) yaitu anak yang bekerja secara informal dikota yang lebih dikenal dengan anak jalanan, juga di laporkan dalam kondisi yang lebih rentan terhadap kekerasan dan kecanduan obat bius. Dari pengertian tersebut, anak jalanan merupakan anak yang dipaksa keberadaannya karena suatu keadaan antarlain faktor ekonomi, keharmonisan, keluarga, kriminalitas, dan sebagainya. Yang ia sendiri tidak menginginkannya sehingga membuat dirinya harus mempertahankan untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja, dan kapan saja mereka bisa (R. moh. Yakobw.2000:17)

2.6.2. Karakteristik Anak Jalanan

Karakteristik anak jalanan dalam Asmawati (2014:147) mengelompokkan anak jalanan menjadi dua yaitu sebagai berikut; anak semi jalanan dan anak jalanan murni. Anak semi jalanan diistilakan untuk anak yang hidup dan mencari kehidupan di jalan, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan keluarga. Sementara itu, anak jalanan murni diistilakan anak yang hidup dan menjalani kehidupan di jalan tanpa mempunyai hubungan dengan keluarganya

Menurut Tata Sudrajat (1995) membagi anak jalanan dalam tiga kelompok yang berdasarkan hubungan dengan keluarganya, adalah: 1) anak yang putus hubungan dengan orangtuanya, tidak sekolah, dan tinggal dijalanan; 2) anak yang hubungannya tidak teratur dengan orangtuanya, tidak sekolah, kembali ke orangtua seminggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali bisa disebut anak yang bekerja di jalan; 3) anak yang putus sekolah, kelompok ini termasuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan.

2.6.3. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Menurut Abu Huraerah (2016 :78) yaitu beberapa penyebab munculnya anak jalanan, sebagai berikut:

1. Orangtua menyuruh anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
2. Perlakuan salah terhadap anak dan kasus kekerasan oleh orang tua sehingga anak turun ke jalan;

3. Anak terancam putus sekolah karna orangtua sudah tidak mampu membayar
4. Makin banyak anak hidup di jalan karna biaya kontak mahal;
5. Timbulnya dengan pesaing pekerja dewasa di jalan sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan yang sangat beresiko
6. Anak jadi lebih lama di jalan sehingga timbul masalah baru; atau
7. Anak jalanan akan jadi korban kekerasan dan pemerasan.

Herlina Astuti dalam Adriyanti Mustikan (2014 : 148) mengungkapkan ada faktor yang mendorong anak turun ke jalan, yaitu:

- a. Tingkat Mikro (*Immediate Cause*). Faktor yang menghubungkan dengan keluarga dan anak. Sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah, jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung lari dari rumah dan turun ke jalan, disuruh kerja di pada saat masih sekolah, bermain dan di ajak teman. penyebab yang berasal dari keluarga adalah : terlantar, ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi psikologi yang ditolak oleh orangtua, didikan yang salah dari orangtua
- b. Tingkat Meso (*Underlying cause*) faktor masyarakat. Sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu pada komunitas masyarakat miskin anak adalah aset guna meningkatkan ekonomi keluarga oleh karenanya anak-anak diajarkan untuk bekerja.

- c. Tingkat Makro (Basic Cause) factor yang berhubungan dengan masyarakat, penyebab banyak waktu dijalan.

2.7. Pelatihan

2.7.1. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu Pendidikan dalam jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga peserta orerasional dapat belajar teknik pengerjaan dan keahlian pada tujuan tertentu

Pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Simanjuntak (2021: 26) mendefenisikan pelatihan adalah bagian dari infestasi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan kinerja anggota, pelatih biasa melakukan pelatihan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan diberikan dalam waktu yang sangat pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan bekerja.

Pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Delser (2021 :26) ialah proses mengajar karyawan atau anggota yang baru atau yang lama untuk mengembangkan keterampilan dasar yang mereka butuhkan dalam menjalankan pekerjaan dan keterampilan, pelatihan merupakan latihan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja, karyawan atau kelompok, baik yang lama ataupun yang baru perlu mengikuti pelatihan karna adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berupa perubahan lingkungan atau pun meningkatkan keterampilan dasar

2.7.2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelatihan

Adapula faktor yang merujuk kearah efektifitas pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Rival (2021:27) yaitu sebagai berikut

- a. Materi atau isi penelitian
- b. Metode pelatihan
- c. Pelatih
- d. Peserta pelatihan
- e. Sarana pelatihan
- f. Evaluasi pelatihan

2.7.3. Metode Pelatihan

Eustasia Cristine Martati dalam Notoatmodjo (2021: 28) metode terbagi menjadi dua merupakan, pelatihan diluar pekerjaan dan pelatihan di dalam pekerjaan

a) Pelatihan diluar Tugas

Pelatihan dengan menggunakan metode ini artinya peserta pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya kemudian mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan teknik belajar yang semestinya. Pada umumnya teknik ini memiliki dua macam teknik yaitu, Teknik presentasi informasi dan simulasi. Teknik presentasi informasi merupakan menyajikan informasi yang bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, kempuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta

b). Pelatihan didalam Tugas

Pelatihan ini di bentuk penugasan pegawai dibawah bimbingan superfisor yang sudah berpengalaman. Dalam metode ini perlu menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya pembimbing yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya
- b) Tersedia waktu yang cukup untuk dapat mencapai tingkat keterampilan
- c) Sikap, dan prilaku pegawai yang mendukung (rajin, tekun, antusias)

2.7.4. Tujuan pelatihan

Tujuan umum pelatihan ialah sebagai berikut: 1) untuk mengembangkan keahlian, 2) untuk mengembangkan pengetahuan, 3) untuk mengembangkan sikap. Sedangkan komponen sebagaimana di jelaskan Eustasia Cristine Martati dalam Mangkunegara (2021: 30) yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan pengawasan dan pelatihan harus jelas
2. Para pelatih harus ahli dan berkualitas
3. Materi pelatihan dan pengembangan harus sesuai tujuan yang di tetapkan
4. Peserta pelatihan harus memiliki dasar keterampilan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan bagaimana Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan cara opservasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada orang yang akan diamati, lalu peneliti juga akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek yang akan diteliti pada dinas Sosial Kota Surabaya dan UPTD . Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan peneliti kembangkan dalam bentuk tulisan dan melakukan pembahasan dengan teori yang sudah di terapkan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan pada Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya yang tepat berada di jalan Arif Rahman Hakim No.132-132 Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jawa Timur. Alasan lokasi ini dipilih karena Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam

memberikan kebijakan dan pelayanan sosial terhadap anak-anak jalanan dan pelayanan sosial lainnya.

3.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam metode kualitatif yang dimaksudkan adalah agar peneliti dapat menentukan informan penelitian yang akan membantu memberikan data dan informasi yang terbaik atau terpercaya mengenai fenomena yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Pendamping , pembina anak jalanan dan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Surabaya.

3.4. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus yang dibahas oleh peneliti adalah Pemberdayaan anak Jalanan melalui program pelatihan di Dinas Sosial Kota Surabaya. dan fokus yang lain adalah untuk mengetahui kendala program pelatihan keterampilan yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Peneliti menggunakan teori Evaluasi kebijakan publik Menurut William Dunn (2003: 608)

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Perataan
4. Kecukupan
5. Keadilan

6. Responsifitas

3.5. Sumber Data

Sumber data adalah catatan atas terkumpulnya fakta yang ada, yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang sebagai pengukuran atau pengamatan suatu variable yang bentuknya dapat berupa kata-kata atau tindakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1). Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung objek penelitian dengan mengamati atau wawancara, peneliti menggunakan data ini agar mendapatkan informasi secara langsung dari objek penelitian, yaitu tentang evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat di peroleh melalui media dan berbagai macam sumber seperti buku harian, dokumen resmi dari pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai untuk melengkapi data atau informasi yang telah di kumpulkan melalui petugas atau pelatihan anak jalanan pada Dinas Sosial.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini teknik yang di gunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*). Maksud untuk mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Lincoln, 1985), antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan tuntutan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. Dengan melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data tertulis atau gambar seseorang untuk melengkapi data wawancara dan untuk membantu peneliti mencapai tujuan, dokumen yang dalam bentuk peraturan, kebijakan, catatan dan biografi.

3.7. Teknis Analisis

1. Reduksi data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis dan menyisihkan informasi yang tidak relevan guna untuk mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat dicatat secara teliti dan rinci.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasikan hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum

Dinas sosial Kota Surabaya di bentuk pada tahun 2001, dinas Sosial merupakan bagian dari pemerintahan kota surabaya yang bertugas di bidang sosial. Kemudian dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab dan nyata pada pemerintah Kota Surabaya dan untuk mendukung peyelenggara pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi sebagai penerima kewenangan daerah, oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mengatur kembali Dinas Sosial kota Surabaya. Untuk itu pemerintah menetapkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2001 tentang organisasi Dinas Kota Surabaya. Dalam perda tersebut pemerintah melakukan penetapan pembentukan Dinas-Dinas pada Kota Surabaya yang terdapat 23 dinas, yang termasuk di dalamnya Dinas sosial. Dinas sosial merupakan hasil peleburan dari bagian sosial dan cabang dinas sosial merupakan instansi vertikal pemerintah kota. Dinas sosial memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial yang meliputi perencanaan, rehabilitas sosial, peyuluhan, penyusunan program, peyelenggara bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan

4.1.2. Lokasi Dinas Dinas Sosial Kota Surabaya

Alamat: Jl.Arief Rahman Hakim No. 132-133, Keputih, Kecamatan Sukolilo,Kota Surabaya

Telepon : (031)59174416

Website :www.Surabaya.go.id

4.1.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surabaya

Visi:

Visi ini memiliki arti:sebagai fasilitator di tuntut untuk mampu memberikan akses dan kemudahan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pelayanan sosial dasar,rehailitas,dan perlindungan sosial yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan.

Misi:

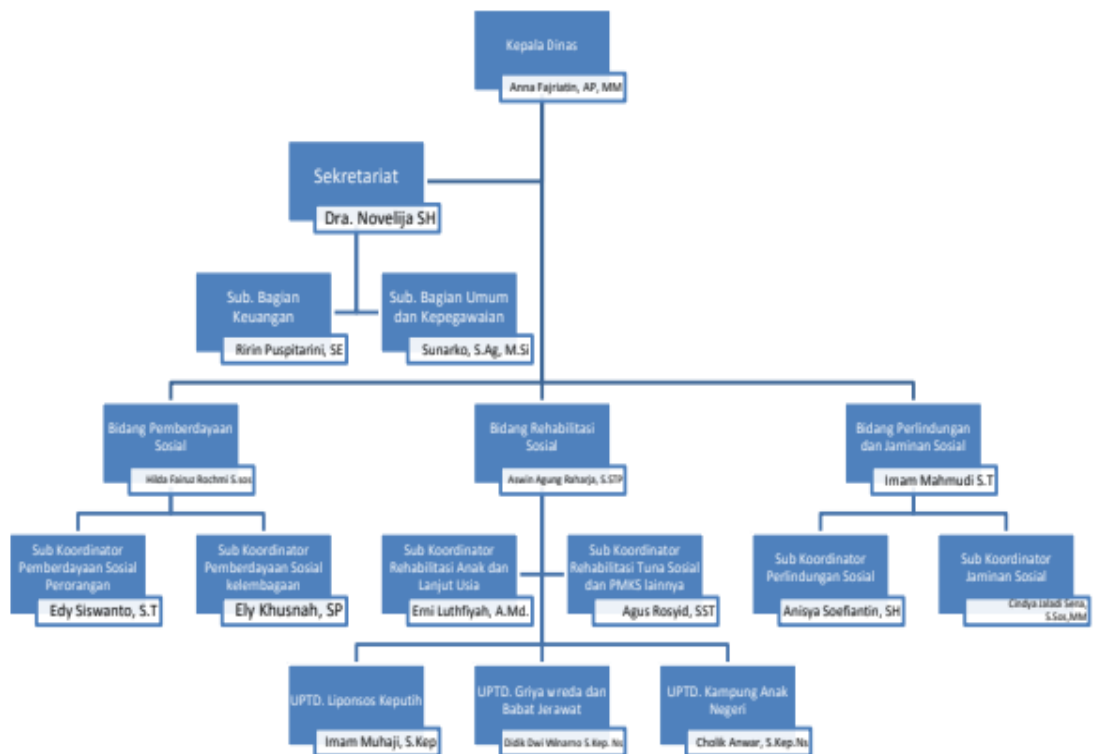
Untuk mewujudkan visi tersebut,misi yang di rumuskan:

meningkatkan kinerja dinas meningkatkan kualitas layanan publik,didkung oleh sistem dan prosedur yang pasti mewujudkan kerukunan hidup beragama,multi kultur dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat

4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya

Berikut Adalah struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya



Sumber : Kantor Dinas Sosial Surabaya 2021

4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya

Berdasarkan peraturan Wali Kota Surabaya No. 40 Tahun 2018 Tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya adalah: Tugas Dinas Sosial merupakan melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Sosial serta melaksanakan pembantuan yang di berikan pemerintah kota dan atau pemerintahan propins.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
2. Penyelenggara urusan pemerintah dalam pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
4. Pengolahan ketatausahaan Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepalah daerah atau wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi dari setiap jabatan kantor Dina Sosial Kota Surabaya

A. Kepala Dinas :

- a) Memimpin kelembagaan dinas sosial
- b) Merumuskan kebijakn lembaga
- c) Membina
- d) Mengendalikan

- e) Mengkordinasikan dan mempertanggung jawab kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintah kota atau daerah berdasarkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Peyelenggara urusan pemerintah dan peyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugaas sesuai dengan lingkup tugas
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kali Kota sesuai tugas dan fungsi

B. Sekertariat

- 1) Pelaksanaan kordinasi perencanaan program, anggaran, dan laporan dinas
- 2) Pemberian rekomendasi unndian skala kota
- 3) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- 4) Pengelolah administrasi kepegawaian
- 5) Pengelola surat menyurat, dokumentasi rumahtangga dinas, perlengkapan, peralatan kantor, kearsipan, dan perpustakaan
- 6) Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor
- 7) Pelaksana hubungan masyarakat dan keprotokolan
- 8) Penyusun perencanaan bidang sosial skala kota
- 9) Pelaksanaan kordinasi pemerintah di bidang sosial skala kota

- 10) Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksana pedoman dan standarisasi
- 11) Pelaksanaan kegiatan atau program dibidang Sosial skala Kota
- 12) Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kota kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial
- 13) Pemerian izin pengumpulan uang skala Kota

C. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Meyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian
- 2) Meyiapkan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang umum dan kepegawaian
- 3) Meyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian
- 4) Meyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 5) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Sub Bagian Keuangan

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis didang keuangan

- 2) Meyiapka bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang keuanga
- 3) Meyiapkan bahan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang keuangan
- 4) Meyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 5) Melaksanakan tugas yang diberikan sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsi

E. Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Swadaya Sosial

- 1) Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi pada bidang bina Sosial keagamaan dan Swadaya
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis dibidang bina Sosial keagamaan dan swadaya
- 3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pada bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial
- 4) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis dibidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial
- 5) Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial
- 6) Pelaksanaan pengumpulan data di bidang keagamaan dan swadya sosial
- 7) Pelaksanaan pengumpulan data di bidang keagamaan dan swadaya sosial
- 8) Pelaksanaan pertimbangan pemberian bantuan pada lembaga keagamaan

- 9) Pelaksana fasilitas penyelenggara kegiatan keagamaan
- 10) Pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan perjuangan serta nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi
- 11) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan Taman Makam Pahlawan
- 12) Penyiapan kelengkapan usulan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan printis kemerdekaan
- 13) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi swadaya masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial
- 14) Pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial
- 15) Pelaksanaan pengurusan calon calon peserta pendidik dan pelatihan pekerja sosial skala kota
- 16) Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota
- 17) Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin undian gratis berhadiah di tingkat kota
- 18) Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin pengangkatan anak skala kota
- 19) Pelaksanaan proses penerbitan surat tanda pendaftaran, surat pendaftaran ulang dan rekomendasi bagi organisasi sosial skala kota

- 20) Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan/non perizinan yang telah di terbitkan
- 21) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial
- 22) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaksanaan tugas
- 23) Pelaksanaan laporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- 24) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya

F. Seksi Bina Sosial Keagamaan

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan
- 2) Menyiapkan bahan pelaksana program kerja dan petunjuk teknis dibidang bina sosial keagamaan
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang sosial keagamaan
- 4) Menyiapkan bahan pelaksana kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan
- 5) Menyiapkan bahan pelaksana pengumpulan data di bidang keagamaan

- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pertimbangan pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas penyelenggara kegiatan keagamaan
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan
- 9) Menyiapkan bahan pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Menyiapkan bahan pelaksana indikator kinerja sesuai bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- 11) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial sesuai tugas dan fungsi.

G. Seksi Bina Swadaya Sosial

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses teknis perijinan di bidang swadaya sosial
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kerja di bidang bina swadaya sosial
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang bina swadaya sosial
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina swadaya sosial

- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang bina swadaya sosial
- 6) Menyiapkan bahan pengumpulan data di bidang bina swadaya sosial
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai kesetiakawanan sosial sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi
- 8) Menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan, dan pemeliharaan taman makam pahlawan
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan printis kemerdekaan
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan jaringan terhadap organisasi swadaya masyarakat dan penanganan permasalahan sosial
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitas potensi kesejahteraan sosial
- 13) Menyiapkan bahan pelaksan pengurusan calon peserta pendidikan profesi sosial skala kota
- 14) Menyiapkan bahan pengusulan calon peserta pendidik dan pelatih pekerja sosial skala kota

- 15) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin pengangkatan anak skala kota
- 16) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian ijin pengumpulan sumbangan skala kota
- 17) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penerbitan surat tanda pendaftaran, surat tanda pendaftaran ulang dan rekomendasi bagi organisasi sosial skala kota
- 18) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan/non perizinan yang diterbitkan
- 19) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawas dan pengendalian di bidang bina swadaya sosial
- 20) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Rehabilitas Sosial

- 1) Pelaksanaan pemerosesan teknis perijinan/non perijinan dibidang rehabilitas sosial
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitas sosial

- 3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggara pelayanan dan rehabilitas sosial
- 4) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitas sosial
- 5) Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitas sosial
- 6) Pelaksanaan pengumpulan data terkait pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap anak lanjut usia, lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 7) Pelaksana pembinaan dan pemberdayaan bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 8) Pelaksanaan proses pemberian surat rekomendasi berobat bagi orang terlantar
- 9) Pelaksanaan proses pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitas sosial
- 10) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 11) Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai bidang ada tertung dalam dokumen perencanaan strategis
- 12) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi

I. Seksi Rehabilitas Anak dan Lanjut Usia

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknik pada bidang rehabilitas anak dan lanjut usia
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitas anak dan lanjut usia
- 3) Menyiapkan han pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitas anak dan lanjut usia
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang rehabilitas anak dan lanjut usia
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data terkalt pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak dan lanjut usia
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan peleksanaan pembinaan dan pemberdayaan,dan bantuan sosial bagi anak dan lanjut usia
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitas anak dan lanjut usia
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator bidang yang tedapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitas sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

J. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Penyandang Disabilitas

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 5) Menyiapkan bahan pengumpulan data terkait pembina, penyelenggara, dan bantuan sosial bagi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sosial bagi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian surat rekomendasi berobat bagi orang terlantar
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitas sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsi

K. Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) Pelaksanaan pemrosesan teknik perijinan/non perijinan di bidang kesejahteraan sosial
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kerja di bidang kesejahteraan sosial
- 3) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial
- 4) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial
- 5) Pelaksanaan kosrdinsi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial
- 6) Pengumpulan data terkait penanganan fakir miskin dan rehabilitas rumah tidak layak huni
- 7) Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni meliputi komponen non struktural antara lain dinding pengisi ,kusen, penutup atap, langit- langit dan lantai
- 8) Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial
- 9) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin

- 10) Kordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, dan pendamping
- 11) Pelaksanaan program keluarga harapan
- 12) Pelaksanaan pemberian bantuan non tunai
- 13) Pelaksanaan operasional ambulan
- 14) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin
- 15) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial
- 16) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 17) Pelaksanaan indikator kinerja sesuai bidang yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi

L. Seksi Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknik di bidang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
- 3) Meyiapkan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis kerja di bidang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni

- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data terkait rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi sasaran perbaikan rumah tidak layak huni
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni meliputi komponen non struktural antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit- langit dan lantai
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
- 9) Menyiapkan bahan pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang sesuai dengan dokumen perencanaan strategis
- 11) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi

M. Seksi Penanganan Fakir Miskin

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis kerja di bidang penanganan fakir miskin

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penanganan fakir miski
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kosrdinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain pada bidang penanganan fakir miskin
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data terkait penanganan fakir miskin
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin
- 8) Menyiapkan bahan kordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan
- 9) Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan program keluarga harapanMenyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan pemberian bantuan pangan non tunai,meyiapkan bahan operasinal ambulan
- 10) Menyiapkan bahan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan fakir miskin

- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 13) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai bidang yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 14) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi

O. Bidang Perencanaan, Pendataan Pengawasan dan Pengendalian Masalah

Sosial

- 1) Pelaksana pemrosesan teknis perijinan/non perijinan /rekomendasi di bidang pengawasan, pendataan dan pengendalian masalah sosial
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan pendataan pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pendataan, pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 4) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pendataan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, pendataan, dan pengawasan dan pengendalian
- 6) Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pendaftaran kemiskinan, potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan

sosial serta pendataan individu atau keluarga yang membutuhkan penanganan kesejahteraan sosial

- 7) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta data individu dan keluarga yang membutuhkan penanganan kesejahteraan sosial
- 8) Pelaksanaan distribusi hasil pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan, potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta data individu dan keluarga yang membutuhkan penanganan kesejahteraan sosial
- 9) Pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota
- 10) Pelaksanaan integrasi sistem informasi data masalah sosial
- 11) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise peyelenggara pendataan
- 12) Pelaksanaan sinkronisasi hasil pelaksana program dan kegiatan penanganan masalah sosial
- 13) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan, pendataan, pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 14) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 15) Pelaksanaan laporan indikator kinerja sesuai dengan bidang yang terdapat dalam perencanaan strategis

- 16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi

P. Seksi Perencanaan dan Pendataan Masalah sosial

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendataan masalah sosial
- 2) Menyiapkan bahan pelaksana perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pendataan masalah sosial
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pendataan masalah sosial
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga di bidang perencanaan pendataan masalah sosial
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pendataan kemiskinan, potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pendataan individu atau keluarga yang memerlukan penanganan kesejahteraan sosial
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan, potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta data individu dan keluarga yang membutuhkan penanganan masalah kesejahteraan sosial
- 7) Menyiapkan bahan pelaksana distribusi hasil pendatan dan pemutakhiran data kemiskinan, potensi sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah

kesejahteraan sosial serta data individu atau keluarga yang membutuhkan penanganan kesejahteraan sosial

- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi sistem informasi data masalah kesejahteraan sosial skala kota
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggara pendataan
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pendataan masalah sosial
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 12) Menyiapkan bahan pelaporan indikator kinerja sesuai bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perencanaan, pendataan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsi

Q. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Masalah Sosial

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pengendalian masalah sosial

- 4) Menyiapkan bahan pelaksana kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan penanganan masalah sosial
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanganan masalah sosial
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian masalah sosial
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang sesuai dalam dokumen perencanaan strategis
- 10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang perencanaan, pendataan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi

R. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD)

Unit pelaksanaan teknis dinas merupakan panti sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah terseleksi. Panti merupakan upaya terakhir apabila masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut Unitk Pelaksana Teknis Dinas dibawah naunngan Dinas Sosial Kota Surabaya.

- a. UPTD Kampung Anak Negeri

Merupakan pondok sosial yang di pergunakan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang bermasalah secara sosial di Kota Surabaya, yang berlokasi di Jl. Wonorejo, Rungkut Surabaya

b. UPTD Liponsos Keputih

Merupakan suatu lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tugas untuk menampung serta memberikan pelayanan Sosial kepada ODGJ, Gepeng, PRSE, Anak jalanan, Laansia terlantar yaang teraazia oleh Polisi, Satpol PP, maupun peyerahan warga Kota surabaya yang berlokasi di Jl. Keputi Tegal. No 32 Surabaya

c. UPTD Griya Werda

Merupakan pondok sosial yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia yang terlantar di kota surabaya yang berlokasi di Jl. Jambangan Baru Tol No. 5 A

d. UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Merupakan pondok sosial sebagai tempat pembinaan anak berkebutuhan khusus (tuna grahatia) dan mahasiswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berlokasi di Jl. Vila Kalijudan Indah xv Kav. No 2-4 Surabaya

e. UPTD Babat Jerawat

Merupakan pondok sosial yang digunakan untuk tempat penampungan eks kusta yang berlokasi di Jl. Raya Babat Jerawat No. 139

4.1.6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial

1. Program Pelayanan dan Rehabilitas sosial

- a. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS
- b. Pemberdayaan keluarga miskin melalui rehabilitas sosial daerah kumuh
- c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan bagi PMKS di UPTD lingkungan pondok sosial kusta babat jerawat
- d. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri
- e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha
- f. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan pelatihan keterampilan bagi lanjut usia
- g. Penanganan masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- h. Penyusunan perencanaan kebijakan pelayanan rehabilitas sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- i. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih

- j. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan, anak terlantar, anak cacat, anak nakal.

2 . Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Pembinaan, pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial
- b. Pemeliharaan taman makam pahlawan
- c. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- d. Penyediaan kebutuhan bagi panti sosial
- e. Peyelenggara kegiatan keagamaan.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan kualitas pelayanan, dan sarana prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD pondok sosial kali judan

4. Program Administrasi Perkantooran

Peyediaan barang dan jasa perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4.1.7. Profil UPTD Kampung Anak Negeri

Masalah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat terutama yang berada di daerah perkotaan. Pemkot Surabaya telah

melakukan langkah-langkah/kebijakan guna menangani masalah PMKS untuk warga Kota Surabaya, salah satunya Pembangunan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) khususnya Anak Jalanan, anak nakal dan anak terlantar. Kegiatan tersebut dilaksanakan UPTD Kampung Anak Negeri yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD Kampung Anak Negeri ialah suatu lembaga unit pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tanggungjawab memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak nakal, jalanan dan anak terlantar atau dari keluarga penyandang masalah sosial warga Kota Surabaya dimana pelayanan sosial yang diberikan dapat menimbulkan keuntungan kemanfaatan keterampilan dan bakat sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosialnya di masyarakat

A. Visi Dan Misi

Visi :

Terwujudnya anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat.

MISI :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah sosial dalam sistem Kampung Anak Negeri

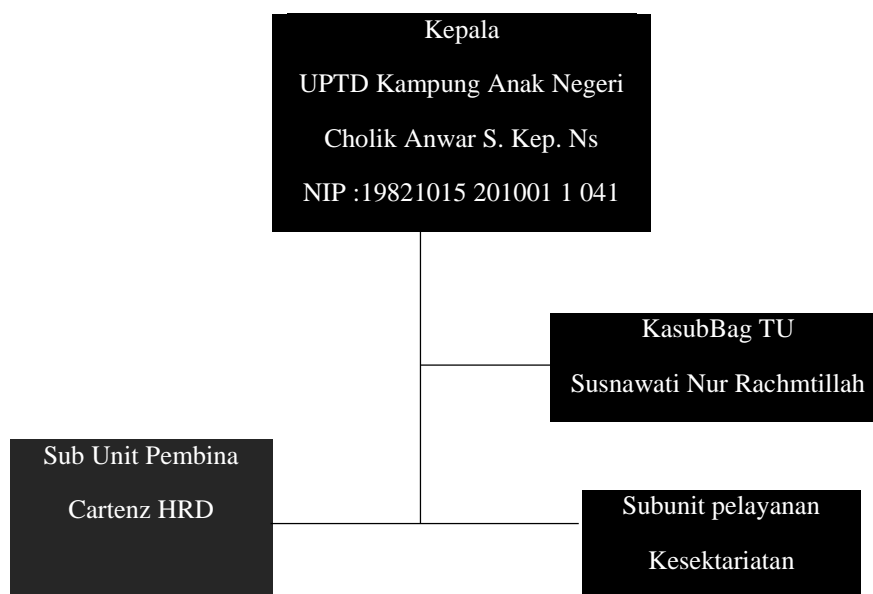
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak bermasalah sosial
- c. Memfasilitasi tumbuh kembang, memotivasi dan memberikan arahan untuk mengembangkan minat bakat yang dimiliki
- d. Mencetak anak yang memiliki permasalahan sosial menjadi anak yang mandiri dan berperilaku normatif di Masyarakat.

B. Tujuan

Pulihnya kembali rasa harga diri, kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial, serta kemajuan kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus dalam menjalankan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

C. Struktur organisasi UPTD Kampung Anak Negeri

Gambar 4.2
Struktur organisasi UPTD Kampung Anak Negeri



Sumber : UPTD Kampung Anak Negeri 2021

D. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas pada UPTD Kaampung Anak Negeri sebagai Berikut

❖ Kepala UPTD

1. Bertugas melaksanakan prinsip kordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instasi lain
2. Bertanggungjawab memberikan pembinaan atau bimbingan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

❖ SubBag TU

1. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
2. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan UPTD
3. Pelaksanaan ketata usahaan UPTD
4. Melaksanakan kordinasi penyusunan laporan
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

❖ Sub Unit Pembina dan Pengembangan

1. Melaksanakan pembinaan fisik, bimbingan sosial, bimbingn mental, bimbingan ketarampilan dan kecerdasan kepada anak asuh/penghuni asrama;

2. Melaksanakan fasilitas kegiatan seni, olahraga, bimbingan keterampilan dan kecerdasan anak asuh/penghuni asrama;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan fungsinya.

❖ Sub Unit Pelayanan

1. Melaksanakan fasilitas kebutuhan anak asuh/ penghuni asrama
2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kesehatan anak asuh/penghuni asra
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan anak asuh atau asrama
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan usaha pengembalian dan penerimaan ke keluarga atau dari keluarga atau masyarakat
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

E. Landasan Hukum

- a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

- b) Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
- c) Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
- d) Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;

4.2. Hasil Temuan Penelitian

4.2.1. Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

Penelitian ini dilakukan peneliti mengenai evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya, menyajikan data-data dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan pelatih, Pembina dan anak jalanan. Hasil wawancara akan di kaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik menurut Willam Wunn (2003:610) untuk mengetahui Evaluasi Pemberdayan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Dinas Sosila yang yang di laksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Teori Evaluasi Kebijakan publik yang

digunakan (1)efektifitas (2) efisiensi (3) pemerataan (4) kecukupan (5)keadilan (6) responsifitas)

A Efektivitas:

Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalis teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

1. Apakah program program latihan keterampilan tersebut mencapai hasil yang diinginkan, atau sudah mencapai tujuan saat perogram tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil program latihan keterampilan yang dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan

Hasil wawancara

Menurut Rian selaku anak binaan (anak jalanan) Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara 9 Januari 2022 mengatakan bahwa:

“ sudah,saat Pelaksanaan programlatihan keterampilan ini kami sudah bisah meningkatkan keterampilan dan bakat kami guna membantu dan memberdayakan kami untuk meningkatkan keterampilan , oleh sebab itu pelaksanaan pelaksanaan program latihan keterampilan harus dilakukan secara efesien dan efektif, artinya sesuai dengan kebutuhan kami anak jalanan dan program ini sangat bermanfaat bagi kami anak-anak jalanan”

Pernyataan tersebut di dukung oleh pendapat dari Bapak Antonius Sarino selaku pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri pada saat wawancara pada tanggal 10 januari 2022 yang menyatakan bahwa:

“pelaksanaan Program latihan keterampilan yang dibuat buat oleh Dinas Sosial Surabaya yang di laksanakan di UPTD ini sudah efektif karena melalui program ini dapat meningkatkan keterampilan dari anak jalanan dan dapat di berdayakan dengan baik”

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Antonius Sarino selaku pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri



B. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Pemberdayaan anak jalanan adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

1. apakah Pemberdayaan anak jalana sudah mencapai tingkat yang efisien

Menurut bapak Budiono selaku pelati di UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 9 januari 2022 mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program latihan keterampilan yang diharuskan dapat bermanfaat bagi para anak jalanan dan yang bermasalah

sosial yang secara efektifitas dan efesien sehingga dapat diketahui latihan keterampilan yang dilaksanakan dapat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan anak jalanan yang secara otomatis akan merubah keadaan anak jalanan akan menjadi lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat Tanpa pelaksanaan program yang mengarah pada efektifitas dan efesien maka dampak tersebut tidak akan terlihat”

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara 9 januari 2021

“ Sudah efektif karna pelaksanaan perogram ini dijalankan sesuai dengan prosedur yang tepat sehingga dapat melatih anak dan terampil di bidang mereka masing-masing”

Gambar 2 wawancara dengan Bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri



C. Kecukupan

Berkenaan dengan suatu tingkat efektif memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Salah satu tujuan dari program latihan keterampilan adalah dapat dapat meningkatkan keterampilan pada anak jalanan

1. apakah program latihan keterampilan yang dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan anak jalana.

Menurut Ibu Intan Maulida selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 16 januari 2022 menyatakan bahwa:

“Sudah cukup;Latihan keterampilan sangat membantu pemberdayaan anak jalanan, karena dengan adanya program latihan keterampilan ini anak jalanan dapat mengembangkan bakat, keahlian, dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bekal kehidupan sosial di masyarakat

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari bapak Antoni selaku pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri pada saat wawancara pada tanggal 16 januari 2022 yang menyatakan bahwa

“ sudah cukup karena pemberdayaan yang di berikan oleh dinas sosial sudah salah satunya program latihan keterampilan ini sudah meningkatkan keterampilan anak jalana bakat, keahlian, dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bekal kehidupan sosial di masyarakat,bahkan dari hasil latihan keterampilan ini beberapa anak UPTD Kampung Anak Negeri bisah mengikuti lomba dan melakukan pertunjukan hasil keterampilan mereka di tingkat profinsi”

D. Pemerataan

Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.

1. bagaimana pelaksanaan perogram pelatihan keterampilan apa sudah merata

Menurut Ibu Intan Maulida selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 16 januari 2022 menyatakan bahwa:

“ saya rasa sudah mas, karena pemberdayaan melalui program keterampilan ini di fokuskan kepada anak jalanan, anak terlantar, dan anak peyandang masalah sosial, dengan memberikan latihan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka setiap harinya seper makan,minum, pakayan, pendidikan, pelatihan”

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak samsul selaku pelati di UPTD Kampung

Anak Negeri meyakini bahwa

“Kalo untuk pemerataannya mas sudah, kami selaku petugas di sini sudah memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada anak jalanan dan meyediakan kebutuhan ekonomi mereka sesuai yang di butuhkan mereka dan memfasilitasi mereka seperti pendidikan dan alat latihan keterampilan”

Tabel 4.1
Fasilitas UPTD Kampung Anak Negeri

NO	FASILITAS UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI
1	Ruangan Kepala UPTD
2	Ruangan Administrasi/dan perlengkapan kantor
3	Asrama anak-anak
4	Ruangan tidur 8 unit
5	Ruangan praktek pembinaan
6	Mushola
7	Ruangan konseling
8	studio music
9	Alat music
10	Ruangan melukis dan alat lukis
11	Ruang praktek usah dan bahan praktek
12	Kamar mandi
13	Sepeda
14	Mobil
15	Ruangan perpustakaan

16	Ruang makan,dapur,kamar mandi
----	-------------------------------

Sumber : UPTD Kampung Anak Negeri

Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Intan Muli pada tanggal 15 Januari 2022



E. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu, kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

1. Apakah hasil atau nilai program latihan keterampilan Dinas Sosial Kota

Surabaya dapat dianggap dibutuhkan bagi anak binaan Di UPTD Kampung Anak Negeri dan di perlukan karena hal itu dapat mempengaruhi tujuan lain?

Menurut bapak samsul selaku pendamping UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 17 Januari 2021 mengatakan bahwa :

“ iya, karena mereka dapat menerima bekal-bekal berupa keterampilan, sebagai salah satu usaha kami meningkatkan kualitas anak-anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri dapat di tempuh melalui pelatihan keterampilan melalui program latihan keterampilan contohnya musik, tenis meja, bela diri silat dan anak asuh di uptd mampu mandiri untuk bekal mereka di masa depan. Anak-anak ini dapat mengguna keterampilan yang mereka pelajari dan dengan keterampilan yang mereka miliki, para anak di UPTD kampung anak negeri mampu menangani suatu pekerjaan sesuai jenis dan bakatnya dengan demikian program latihan keterampilan sangat diperlukan bagi anak asuh di UPTD ini. Tujuan lainnya terwujudnya anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat”

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari bapak Budiono selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada saat wawancara pada tanggal 16 Januari 2022 yang menyatakan bahwa:

“ diperlukan, anak sangat membutuhkan pelatihan keterampilan karna dengan melelati keterampilan menimbulkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak bermasalah sosial. Tujuan lain, untuk memulikan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial serta kemampuan anak berkebtuhan khusus dalam menjalankan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat ”

F .Keadilan

Ketepatan Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban dan yang sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan.

1. Apakah hasil program latihan keterampilan yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Surabaya sudah mencapai ketepatan tujuan yang ingin dicapai

Menurut bapak Budiono selaku pelati di UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 9 januari 2022 mengatakan bahwa:

“ kalau untuk ketepatan saya rasa sudah mas,karna anak-anak sudah terampil dalam bidang minat dan bakat mereka,seperti berbain musik,melukis, dan beladiri sehingga dapat menjdi bekal dalam menempu kehidupan mereka jika mereka sudah keluar dari UPTD Kampung Anak Negeri ini dan tidak bergantung pada orang lain lagi”

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancar 19 januari 2021

“ Sudah mas,karna anak sudah sudah terampil di bidang mereka masing-masing,meskipun di awal pelatihan anak anak susah untuk diajari, tapi dengan dekukuang dari pembina dan pelati anak akhirnya bisah terampil ada anak yang inin mengikuti semua latihan keterampilan yang ada di UPTD ini mas”

4.2.2. Kendala Program Latihan Keterampilan Dinas Sosial Kota Surabaya

1. Apa faktor kendala program latihan keterampilan pada dinas sosial kota Surabaya yang di laksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri ?

Menurut ibu intan selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 10 januari 2022 mengatakan bahwa :

“Kalau untuk penghambat, kendalanya ada yang susah menangkap pelajaran dan pelatihan keterampilan kareknan anak-anak berbeda-beda daerah dan faktor masalalu juga dan dari sisi keluarga yang kurang perhatian terhadap anak, dan itu menjadi kendala kami dari petugas UPTD Kampung Anak Negeri. Tapi itu menjadi tugas kami untuk melatih dan merawat anak jalanan dan anak terlantar dan anak yang bermasalah sosial”

Pernyataan tersebut di lengkapi oleh bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 15 Januari 2022 mengatakan bahwa :

“ kalo kendalanya mas kurangnya kesadaran dari anak pentitingnya melatih keterampilan mengerti mas merekakan masi anak apa lagi anak ini kan masuk di UPTD ini kan karena masalah sosial, tapi ini juga menjadi motifasi buat kami agar bersabar untuk membimbing memberikan latihan keterampilan kepada mereka”

Gambar 4 wawancara dengan Bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri



4.2.3 Peran pemerintah dalam pemberdayaan anak jalanan

- **Fasilitator**

Merupakan peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan

1. apa saja peran pemerintah sebagai fasilitator

Menurut bapak samsu selaku pendamping UPTD Kampung anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 17 januari 2022 mengatakan bahwa

“ pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana, petugas, modala, pendidikan dan pelatihan, meberikan pelatihan secara teknis dalam pemberdayaan anak jalanan di kota surabaya ”

Pernyataan tersebut di lengkapi oleh bapak Samsul selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 15 januari 2022 mengatakan bahwa :

“Pemerintah sudah memberikan meyediakan sarana dan prasarana dalam pemeberdayan anak jalana di kota surabya, pendidikan dan pelatihan guna memberdayakan anak jalanan yang dengan teknis yang baik”

Tabel 4.2
Data pegawai UPTD Kampung Anak Negeri

UPTD Kampung Anak Negeri Memiliki 20 pegawai yaitu sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1	Cholik Anwar S. Kep. Ns	Kepala UPTD
2	Susnawati Nur Rachmatillah	KaSubBag Tata Usaha
3	M.Arifin	Staf PNS
4	Budiono,S.Or.	Pembina
5	Syamsul Arifin	Pembina
6	Rasditya Permana Mahendratama, SP	Pembina
7	Suyipto, SH, M.Pd.I	Pembina

8	Suroso	Pendamping
9	Nur Hidayad	Pendamping
10	Imam Mu'akhir	Pendamping
11	Antonius Sarino, SH	Pendamping
12	Sulastri	Juru masak
13	Nasiantul Khasanah, Amd. Kep.	Juru masak
14	Anton Effendy Purnomo	Petugas Keamanan
15	Edy Suyitno	Petugas Keamanan
16	Gunarto	Petugas Keamanan
17	Ridhani	Perugas Kebersihan
18	Jamil	Perugas Kebersihan
19	Intan Maulia	Pembina
20	Pucung Dwi Handoko	Sopir

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri 2022

Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan

1. Apa saja peran pemerinta sebagai dinamisator

Menurut bapak samsu selaku pendamping UPTD Kampung anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 19 januari 2022 mengatakan bahwa

Pemerinta sudah memberikan arahan dalam pemberdayaan anak jalanan dengan membuat program latihan keterampilan

pada UPTD Kampung Anak Negeri ini sehingga dapat memudak untuk melakukan pemberdayaan pada anak jalanan, anak terlantar, dan anak bermasalah sosial

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu Intan selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara pada tanggal 17 Januari 2022 menyatakan bahwa

Pemerintah sangat berperan penting mas karena perogram ini kan dari pemerintah, dalam hal pemerintah sudah menyediakan program pemberdayaan anak jalanan, anak terlantar, dan yang bermasalah sosial, dan juga dalam pemberdayaan ini pemerintah juga sudah menyediakan program latihan keterampilan untuk memudahkan pemberdayaan yang di laksanakan di sini (UPTD kampung Anak Negeri)

Tabel 4.3
Data Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	UMUR	JENIS MASALAH
1	Ahmat Irfan	SD kelas 3	10	Anak Terlantar
2	Ahmat Irfan	SMP kls 9	18	Anak Nakal
3	Arya Yoga Pratama	Kejar Paket B kelas 9	17	Anak Terlantar
4	Bagus Gede Setiawan	SMP Kelas 8	18	Anak Terlantar
5	Bintang Widiali Suargana	SMK Kelas 12	19	Anak Nakal
6	Chrisna Gustavino Natsir	SMP Kelas 8	17	Anak Terlantar
7	Dirly Pranindya Yudistira	SMP Kelas 8	15	Anak Terlantar
8	Dinly Pramudya Yudistira	SMP Kelas 8	15	Anak Terlantar
9	Dimas Galuh prakoso	SD Kelas 6	14	Anak Terlantar

10	Esta Ramadhon	SMP Kelas 7	15	Anak Jalanan
11	Malvino Irgi Putra Fauzi	SD Kelas 4	14	Anak Jalanan
12	Marfel Maulana	SD Kelas 4	11	Anak Jalanan
13	Muhammad Fauzi	SD Kelas 5	13	Anak Nakal
14	M. Jordan Adjie Pamungkas	SD Kls 5	14	Anak Jalanan
15	Moch. Riskiyani	SD Kelas 1	10	Anak Nakal
16	Nadiv Deco	SD Kelas 6	14	Anak Nakal
17	Radhit Pribadi Tegar	SMP Kelas 9	17	Anak Terlantar
18	Pedrik	SMP Kelas 8	16	Anak Terlantar
19	Reno Heri Setyawan	SD Kelas 6	15	Anak Terlantar
20	Rizky Pangestu	SD Kelas 4	14	Anak Jalanan
21	Sandi Prayoga	SMK Kelas 10	18	Anak Jalanan
22	Syahrul Setiawan	SD Kelas 11	18	Anak Terlantar
23	Vikri Dwi Firmansyah	SD Kelas 4	11	Anak Jalanan
24	Rendy Prasetya	DO SD	16	Anak Jalanan
25	Raffa Erlangga Purnomo	DO SD Kelas 2	12	Anak Terlantar
26	Firmansyah	SD Kelas 5	12	Anak Terlantar
27	Galang Bintang Candra Winata	DO SD	14	Anak Terlanantar
28	Nando Astria	DO SD	10	Anak Terlantar
29	Muhammad Rizky Saputra Subroto			Anak Terlantar

Sumber :UPTD Kampung Anak Negeri 2022

Katalisator

yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipas

1. apa saja peran pemerintah sebagai katalisator

Menurut bapak Budiono selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada wawancara pada tanggal 10 januari 2021 menyatakan bahwa:

“Monitoring yang dilakukan ialah (Dinas Sosial) melakukan pengamatan secara langsung di UPTD Kampung Anak Negeri terhadap anak-anak apakah program terlaksana dengan baik apa belum dan juga melakukan pengamatan/monitoring terhadap pegawai di UPTD Kampung Anak Negeri ini dengan melakukan wawancara apakah ada kendala atau ada hal yang masih kurang. Bahkan Mereka juga (Dinas Sosial) melakukan monitoring.”

Pendapat tersebut di dukung oleh pendapat bu Intan Maulia selaku pembina UPTD Kampung Anak Negeri pada waktu wawancara tanggal 15 januari 2022 mengatakan bahwa:

“Iya,selalu melakukan monitoring baik terdapat anak-anak, pegawai maupun kami sendiri (Dinas Sosial) setelah monitoring itu kami selalu melakukan evaluasi juga untuk mengetahui hasil yang telah kami capai”

4.3. Pembahasan

Pembahasan yang akan peneliti berikut ini merupakan hasil temuan penelitian yang di laksanakan Dinas Sosial Kota Surabaya menggunakan teknik wawancara dengan informan yaitu petugas pelatih dan pembina UPTD Kampung Anak Negeri. Teknik lain yang di gunakan adalah obserfasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab dua (2) rumusan masalah dan juga fokus penelitian dalam evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakn publik william dunn (2003: 610) yaitu (1) efektifitas (2) efisiensi (3) perataan (4) kecukupan (5) keadilan (6) responsifitas).ini menjadi pedoman bagi peneliti untuk menyusun pembahasan yang akan di uraikan berikut ini.

4.3.1 Efektivitas

Berkeaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalis teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

Berdasarkan hasil peneliti hawa Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, program latihan dari dinas sosial terhadap anak jalanan atau mempunyai masalah sosial membawasudah efektif karena memberikan dampak yang positif pada anak-anak jalanan yang dimana mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang diberikan oleh pembina dan pelatih UPTD. mereka

menjadi percaya diri yang dapat menjadikan mereka pribadi yang tidak takut dalam menghadapi tantangan, menjadi pribadi yang mandiri sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Dengan meningkatkan keterampilan yang ada pada anak-anak. Dinas sosial telah memberikan bantuan sarana prasarana untuk mendukung pelatihan minat dan bakat pada anak jalanan, anak terlantardan anak bermasalah sosial. Program latihan dari dinas sosial sendiri memiliki tujuan yaitu menjadikan anak-anak mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki, mengembangkan pengetahuan, keahlian dan sikap mereka.

4.3.2 Eefisien

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Pemberdayaan anak jalanan adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, hasil atau nilai program latihan keterampilan dari dinas sosial kota surabaya sudah efisien karena dapat di perlukan bagi anak binaan Di UPTD Kampung Anak Negeri karena melalui program latihan tersebut anak-anak mendapatkan banyak pembelajaran baru baik dari segi kreativitas dan keterampilan maupun pendidikan yang dapat menjadikan bekal untuk nantinya atau dapat membuka usaha dan juga mampu menangani sesuatu dengan kemampuan atau potensi yang telah mereka pelajari sehingga membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri akan potensi yang

mereka miliki dan mampu mengandalkan diri sendiri. Selain itu dapat dianggap di perlukan karena hal itu dapat mempengaruhi tujuan lain tujuan lainnya ialah membentuk karakter dari anak-anak terkhusus bagi anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif sehingga anak-anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri.

4.3.3 Perataan

Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.

Berdasarkan pada hasil temuan peneliti Pemerataan program latihan keterampilan yang diberikan ke anak jalanan, anak bermasalahh sosial dan anak terlantar sudah secara merata merata, dengan pemberian latihan keterampilan sesuai minat dan bakat mereka memberikan kebutuhan kebutuhan mereka baik dari pendidikan, fasilitas, dan kebutuhan mereka masing-masing, memberikan pelatihan moral dengan ini pemerataan dalam pemberdayaan anak jalanan, anak terlantar, anak bermasalah sosial dapat merata tanpa membedakan latar belakang mereka dan mendapat hak-hak mereka sebagai warga negara.

4.3.4 Kecukupan

Berkenaan dengan suatu tingkat efektif memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Salah satu tujuan dari program latihan keterampilan adalah dapat dapat meningkatkan keterampilan pada anak jalanan

Berdasar pada hasil temuan peneliti bawah program latihan keterampilan sudah cukup untuk memberdayakan anak jaalanan, anak yang memiliki masalah sosial dan anak terlantar mereka dapat menerima bekal untuk kehidupan dimasaha depan, salah satu usaha dalam memberdayakan anak jalann, anak terlantar dan anak yang memiliki masalah sosial melalui program latihan keterampilan contohnya keterampilan musik, tenis meja, melukis anak asuh UPTD dengan dengan pelatihan keterampilan yang di pelajari dengan keterampilan yang mereka miliki anak-anak ini dapat mampu mandiri dan bisa menangani suatu permasalahan deng keterampilan yang mereka miliki contohnya kebutuhan ekonomi anak bisah menggunakan keterampilan mereka dalam menghasilkan mencari uang

4.3.5 Keadilan

Berdasarkan pada hasil temuan peneliti, dalam melaksanakan program latihan keterampilan sudah adil , karena pemerintah kota surabya suda meberikan fasilitas pendidikan SD-SMA, fasilitas yang mendukung atau menunjang kreativitas anak-anak seperti, gedung olahraga, alat musik, gedung panjat silat, fasilitas gedung asrama, para pelatih yang melatih minat dan bakat anak-anak serta pekerja-pekerja yang lain. Serta meningkatkan rasa ini mempelajari hal baru dan rasa ingin tahu yang tinggi dari anak-anak jalanan, anak terlantar dan anak peyandang masalah sosial. Program latihan keterampilan pada anak-anak rata-rata

telah mencapai kinerja kerja yang baik dapat di lihat dari hasil feedback anak-anak baik dari bidang pengetahuan maupun bidang kreativitas. Anak-anak memberikan feedback yang baik dengan mengikuti perlombaan dan memenangkan beberapa perlombaan, hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya tingkat kinerja kerja yang baik. Agar kinerja kerja berjalan dengan baik diperlukan sebuah pemantauan atau monitoring. Oleh karena itu dinas sosial melakukan monitoring secara langsung baik kepada anak-anak, para pelatih, pekerja maupun kelengkapan fasilitas, selain itu penting bagi dinas sosial untuk melakukan monitoring terhadap dinas sosial sendiri, sehingga dapat dilakukan evaluasi agar ada perubahan dan terciptanya kinerja kerja yang baik

4.3.6 Responsivitas

dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu, kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, hasil atau nilai program latihan keterampilan dari dinas sosial kota surabaya dapat dianggap di dibutuhkan bagi anak binaan Di UPTD Kampung Anak Negeri karena melalui program latihan tersebut anak-anak mendapatkan banyak pembelajaran baru baik dari segi kreativitas dan keterampilan maupun pendidikan yang dapat menjadikan bekal untuk nantinya atau dapat membuka usaha dan juga mampu menangani sesuatu

dengan kemampuan atau potensi yang telah mereka pelajari sehingga membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri akan potensi yang mereka miliki dan mampu mengandalkan diri sendiri. Selain itu dapat dibutuhkan karena hal itu dapat mempengaruhi tujuan lain, tujuan lainnya ialah membentuk karakter dari anak-anak terkhusu bagi anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif sehingga anak-anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri.

4.3.7 kendala perogram latihan keterampilan

kendala pada program latihan keterampilan pada dinas sosial kota surabaya berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka, sehingga sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya proses pemberdayaan dalam diri mereka. Meskipun pemerintah sudah memfasilitasi mereka dengan baik

4.3.8 Peran Pemerintah Lokal

1. Fasilitator

Merupakan peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang konduktif bagi pelaksana pembangunan

Berdasarkan hasil pada temuan peneliti pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana dalam pemberdayaan anak jalanan dan membuat kebijakan dalam pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan

2.Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan hasil pada temuan peneliti pemerintah menyediakan program latihan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan dan anak terlantar, dengan tujuan agar dapat memberdayakan anak jalanan, anak terlantar dan anak bermasalah sosial dengan program latihan keterampilan dapat mengembangkan bakat dan keterampilan dari anak jalanan, anak terlantar dan anak bermasalah sosial

3. katalisator

yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi

berdasarkan hasil temuan peneliti pemerintah melakukan monitoring dalam pelaksanaan program, baik memonitoring pelaksanaan program apakah berjalan dengan baik, juga melakukan monitoring fasilitas yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri, dan memonitoring kinerja kariawan yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti tentang evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya, maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa : pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial kota surabaya yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri sudah berjalan dengan baik yang telah memberikan dampak positif dan manfaat positif yang baik bagi anak jalanan, anak terlantar dan anak yang memiliki masalah sosial, dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak jalanan, anak terlantar dan anak peyandang masalah sosial, dapat hidup secara layak dan kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa menggatungkan kehidupan di jalanan lagi.

Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka ,sehingga sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya peroses pemberdayaan dalam diri mereka

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada dinas sosial kota surabaya , maka penulis memberika beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Sosial terus memberikan pemberdayaan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial anak jalanan dan anak terlantar
2. Tenaga pekerja dan pelatih UPT Kampung Anak Negeri diharapkan terus meningkatkan kinerja yang baik dan terus meningkatkan kesabaran untuk mendidik dan melatih dalam pemberdayaan anak-anak penyandang masalah sosil, anak jalanan dan anak terlantar agar mereka mendapatkan perhatian yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI (2005) Pengertian Anak Jalanan
- W.L Ayuh Dayah, (2016), Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Melalui Rumah Belajar Bagi Anak Jalanan Di Yayasan Keluarga Anaklangit Kota Tangerang
- Afifudin mokhamad(2014), pembinaan anak jalanan di unit pelaksana teknis dinas(uptd) kampung anak negeri kota Surabaya
- Nurul Tantiana, (2017), Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan pada Dinas Sosial Tanjung Pinang: jurnal umbrah .ac.ad
- Wibowo Hery, Wibhawa Budi, Anandar (2018), Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pendidikan Terhadap Anak Jalanan Binaan Di Rumah Singgah
- Aststri Herliana. (2014), Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Meyimpang
- Nugroho, Adhi Setiawan. (2021), Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Gunah Daerah. Yokyakarta: guepedia
- Arikunto.(2002), Prosedur pendekatan penelitian, suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dunn William. (2000), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yokyakarta: GajahMada Pres
- Thoha Miftah. (2008), Ilmu Administrasi Publik Komputer Kontenporer. Jakarta:Fajar Interpratama Offset
- Islamy Irfan. (1997), Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara. Jakarta:Sinar Grafika
- Anderson,James. (1978). Public Policy Making. New York:Unifersity of Houston
- Nugroho,Rian. (2009), Kebijakan Publik. Jakarta:PT. Alex Media Komputindo
- Subarsono. (2005), Analisis Kebijakan Publik (konsep,teori dan aplikasi). Yokyakarta: Pustaka pelajar
- Nugroho, Rian (2008), Public Policy. Jakarta: Elex Media Komutido
- Cook,Wibawa Samudra. et. al (1994), Evaluasi Kebijakan Publik.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi (2002), Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

- Dunn Wiliam. (2003), Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press
- Sawir Mohammad, Jabar dan Arikunto. (2021), Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Yogyakarta :Budi utama
- Mardikunto, Totok dan Poerwoko Soebianto(2019), Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif kebijakan public. Bandung: Alfabeta. Kusdi.(2009), Teori organisai dan Administrasi . Jakarta: Humanika.
- Martati Christine Eustasia, Simanjuntak, Rival, Notoadmojo, Mangkunegara, (2021), Upaya Meningkatkan Kemampuan. Solo : YLGI

LAMPIRAN




Gambar 1. Foto bersama anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri



Gambar 2. Foto bersama anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri

Gambar 3. Surat selesai penelitian Dinas sosial UPTD Kampung Anak Negeri



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS SOSIAL
UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI
Jl. Villa Kalijudan Indah XV Kav. 2-4 Telp. (031) 3818341
Jl. Wonorejo Timur No 130 Telp. (031) 8701844

SURAT KETERANGAN
Nomor :460/12/436.7.7.3/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholik Anwar S.Kep.Ns.
NIP : 19821015 201001 1 014
Jabatan : Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya


Menyatakan bahwa,

Nama : Abel Jechlydor Nabun
NIM : 2018020006
Universitas : Universitas Dr. Soetomo

Telah nyata melakukan Penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri pada :

Waktu Penelitian : 17 - 29 Januari 2022
Tema Penelitian : Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Januari 2022
Kepala UPTD

Cholik Anwar S.Kep.Ns.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19821015 201001 1 014